

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi saat ini, pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit dan berkesinambungan. Dalam hal pengerahan dana masyarakat, peran bank tidak dapat dikesampingkan.¹ Pengertian Bank dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Di Indonesia dikenal dua jenis bank yakni bank umum dan bank perkreditan rakyat. Dijelaskan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat dijelaskan dalam pasal 1 angka 4 yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank yang bekerja berdasarkan atas kepercayaan masyarakat memiliki peran dan posisi yang sangat strategis dalam pembangunan nasional.²

¹ Muhammad Djumhana, 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung. Citra Adhitya Bhakti. Hal. 67

² *Ibid.*

Kaitannya dengan perekonomian nasional, Compton menyatakan ketidakmungkinan memberi gambaran mengenai ekonomi nasional yang berjalan efisien, tumbuh dengan mantap atau bertahan untuk suatu kurun waktu tanpa dukungan sistem perbankan yang kuat.³ Sistem perbankan yang kuat ditandai dengan bank yang dapat menjaga kesehatannya. Berdasarkan Undang-undang tentang perbankan bank berkewajiban memelihara kesehatan bank. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/Pojk.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah mewajibkan Bank melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

- a. profil risiko (*risk profile*);
- b. *Good Corporate Governance*;
- c. rentabilitas (*earnings*); dan
- d. permodalan (*capital*).

Andrew Crockett mengemukakan bahwa bank adalah unit usaha yang khusus dimana jalannya kegiatan operasional bank tergantung pada sumber dana dari masyarakat. Maka kelangsungan hidup suatu bank ditentukan oleh kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Dari pengertian inilah timbul istilah bank sebagai lembaga kepercayaan. Merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap bank dapat mengakibatkan kegagalan suatu bank.

Kegagalan suatu bank khususnya yang bersifat sistemik, dapat mengakibatkan terjadinya krisis perbankan yang dapat mengganggu kegiatan

³ Eric N. Compton, 1991. *Principle of Banking* (terjemahan Alexander Oey). Jakarta. Akademika Pressindo. Hal. 338

suatu perekonomian terlebih jika negara tersebut menganut sistem keuangan yang berbasis bank, dimana bank memegang peran dominan dalam pergerakan ekonominya, seperti di negara-negara berkembang yang industri perbankannya mendominasi total aset industri keuangan. Dalam kondisi demikian, apabila lembaga perbankan tidak sehat dan tidak dapat berfungsi secara optimal, maka dapat dipastikan akan berakibat pada terganggunya kegiatan ekonomi negara secara luas. Dari deskripsi di atas, dapat dipahami bahwa bank adalah lembaga keuangan yang sangat rentan terhadap risiko.⁴

Risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Lebih luas lagi risiko dapat dimaknai sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Risiko juga dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi dan tidak dikelola dengan baik. Sebaliknya risiko yang dikelola dengan baik akan memberi ruang pada terciptanya peluang untuk memperoleh suatu keuntungan yang lebih besar.⁵

Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah oleh bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Kemampuan perbankan dalam mengelola risiko semakin menjadi perhatian sejalan dengan peningkatan jumlah dan kompleksitas operasional bisnis, peningkatan jumlah kerugian perbankan akibat tindakan kriminal yang melibatkan pihak internal maupun

⁴ Suseno dan Piter Abdullah, 2003. *Sistem dan Kebijakan Perbankan di Indonesia (Seri Kebanksentralan No. 7)*. Jakarta. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia. Hal.9

⁵ Ferry N Idroes dan Sugiarto, 2006. *Manajemen Risiko Perbankan: Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*. Cet.I. Yogyakarta. Graha Ilmu. Hal.7

eksternal, serta penurunan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap kualitas manajemen bank.⁶

Oleh karena dampak dari risiko perbankan tersebut penting untuk diminimalisir, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pelaksana fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan yang sejak tanggal 31 Desember 2013 beralih dari Bank Indonesia mengeluarkan regulasi mengenai manajemen risiko yakni :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dengan adanya peraturan diatas Bank Umum, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia wajib menerapkan peraturan tersebut kedalam kegiatan usaha perbankan. Manajemen risiko dapat dimaknai sebagai suatu serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah telah mengkategorikan 8 bidang risiko dalam proses penerapannya yaitu, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional,

⁶*Ibid.* Hal. 7

Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*), dan Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*).

Risiko Hukum (*Legal Risk*) merupakan salah satu dari kedelapan risiko perbankan yang harus dikelola berdasarkan peraturan di atas. Risiko hukum memiliki spesifikasi tersendiri karena pemerintah menyadari bahwa masih lemahnya aspek hukum dalam perbankan di Indonesia yang belum bisa memenuhi perlindungan bagi masyarakat dan perbankan itu sendiri. Mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*recht staats*), maka aspek hukum dalam perbankan juga merupakan hal yang sangat penting. Pada kenyataannya masih banyak bank yang mengesampingkan *Legal Risk*, untuk memperoleh keuntungan tanpa memperhatikan konsekuensi hukumnya.

Dalam pasal 1 angka 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dijelaskan bahwa risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Dalam penjelasan pasal 5 huruf e dijelaskan juga bahwa risiko hukum timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat edaran nomor : 14/SEOJK/2017 memberikan parameter atau indikator terhadap penilaian *Legal Risk* yaitu :

1. Faktor Litigasi;

2. Faktor kelemahan perikatan dan;
3. Faktor ketiadaan atau perubahan perundang-undangan.

Dapat dipahami bahwa *legal risk* dapat terjadi pada saat prosedur kredit atau pembiayaan pada bank, penandatanganan akad dan penyertaan jaminan juga pada saat penyelesaian kredit macet. Mengingat bahwa kegiatan usaha perbankan bertumpu pada perjanjian sebagai alas dalam prosedur pemberian pembiayaan, maka sangat penting memperhatikan *legal risk* dalam pelaksanaannya. Perjanjian merupakan hukum dan bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang menyepakatinya sebagaimana tertuang dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu prestasi dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁷

Penerapan manajemen risiko disamping sudah menjadi kebutuhan bank dalam meningkatkan kinerja usahanya, juga merupakan suatu kewajiban yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. *Legal Risk* merupakan salah satu risiko yang harus diatasi, mengingat bahwa dampak dari *legal risk* tersebut dapat merugikan bank dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank, maka sudah sewajarnya bank harus secara tepat mengidentifikasi seluruh risiko hukum yang dimungkinkan terjadi dalam kegiatan usahanya dan mengupayakan bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dan bagi bank itu sendiri.

⁷ Subekti, 1979. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. ctk. Keempat. Intermasa. Hal. 1

Penulis tertarik melakukan penelitian di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Kota Batu dikarenakan bank tersebut pernah menjadi bank pembiayaan rakyat syariah terbaik di Jawa Timur namun saat ini sudah tidak beroperasi secara normal, dalam artian bank tersebut sedang bermasalah dan sedang dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.⁸ Oleh karena itu, analisis penerapan *Legal Risk* pada BPRS Bumi Rinjani Kota Batu menjadi suatu pokok bahasan yang menarik dan relevan. Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“ANALISIS YURIDIS LEGAL RISK DALAM TRANSAKSI PEMBIAYAAN PADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BUMI RINJANI KOTA BATU”**.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, adapun rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *Legal Risk* dalam transaksi pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Kota Batu ?
2. Bagaimana dampak dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi dampak dari penerapan *Legal Risk* dalam transaksi pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Kota Batu ?

⁸ Observasi sementara di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Kota Batu. Tanggal 14 September 2017 pukul 13.00 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian hukum ini adalah :

1. Untuk memahami penerapan *Legal Risk* yang ada pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Kota Batu;
2. Untuk memahami dampak dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi dampak dari penerapan *Legal Risk* dalam transaksi pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Kota Batu.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai *Legal Risk* dalam perbankan serta memberikan sumbangsih pemikiran dalam mata kuliah hukum perbankan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan keilmuan hukum bagi penulis dan sebagai ladang aktualisasi dari materi dan teori yang sudah dipelajari penulis disaat perkuliahan. Selain itu, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

b. Bagi Mahasiswa

Memberikan tambahan pengetahuan dan sebagai motivasi bagi mahasiswa untuk melihat hukum bukan hanya pada peraturannya saja namun juga pada penerapannya.

c. Bagi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Kota Batu

Sebagai acuan atau pedoman dalam memperbaiki pelayanan dan sebagai bahan evaluasi kinerja bank untuk kedepannya agar tetap bisa menjalankan kegiatan usahanya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur bagi PT. BPRS Bumi Rinjani Kota Batu maupun Bank lain untuk memperbaiki aspek hukum dalam menjalankan usahanya agar terhindar dari konflik di kemudian hari dan dapat tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum yang tepat.

d. Bagi Masyarakat / Nasabah

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai *Legal Risk* dalam pemberian pembiayaan di BPRS Bumi Rinjani Kota Batu sehingga masyarakat juga memahami aspek hukum apa saja yang harus diperhatikan untuk mencegah adanya konflik dikemudian hari.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁹ Penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan fakta serta hubungan di lapangan hukum yang relevan bagi kehidupan hukum, dan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapat dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.¹⁰

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian atau penulisan.¹¹ Metode pendekatan yang digunakan didalam penyusunan penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian

⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. PT. Bumi Aksara. Hal. 1

¹⁰ Zainudin Ali, 2013. *Metode Penelitian Hukum (cetakan keempat)*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 18

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 112

masalah (*problem-solution*).¹² Dalam penelitian ini penulis mencoba mengkaji ketentuan hukum mengenai *Legal Risk* dan mengkaitkannya dengan keadaan nyata di usaha perbankan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan atau dimana seseorang melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui secara jelas objek penelitian. Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam menentukan pertanggungjawaban data yang diperoleh. Dalam penelitian ini lokasi penelitian dilakukan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Kota Batu. Penulis tertarik melakukan penelitian di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Kota Batu dikarenakan bank tersebut pernah menjadi bank pembiayaan rakyat syariah terbaik di Jawa Timur namun saat ini sudah tidak beroperasi secara normal, dalam artian bank tersebut sedang bermasalah dan sedang dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.¹³

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut :

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁴

Sumber data primer diperoleh dari lapangan secara langsung dengan

¹² Soerjono Soekanto, 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. Hal. 10

¹³ Observasi sementara di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Kota Batu. Tanggal 14 September 2017 pukul 13.00 WIB.

¹⁴ Amiruddin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal. 30

wawancara dan dokumen.

b. Sumber Data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku, artikel ilmiah, jurnal ilmiah, doktrin dan penelitian terdahulu sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini berupa bahan yang meliputi Undang-undang yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/Pojk.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 /Pojk.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 /Seojk.03/2017 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan literatur lain yang relevan dengan permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.¹⁵ Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya, yaitu kepada:
1. Sri Astutik, SE selaku Direktur PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Kota Batu.
 2. M. Sri Wahyudi S, SE., ME dan Eris Tri Kurniawati, SE., MM., Ak selaku tim audit eksternal PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Kota Batu
 3. Nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Kota Batu.

Responden nomor 1 dan 2 dipilih menggunakan metode *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian. Jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi. Responden nomor 3 dipilih menggunakan metode *random*

¹⁵ *Ibid.* Hal. 82

sampling yaitu metode pengambilan data dengan maksud atau tujuan tertentu secara acak. Seseorang atau sekelompok orang diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sekelompok orang tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya.¹⁶

- b. Studi Dokumentasi, teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan data-data yang dimiliki oleh bank yang relevan dengan penelitian ini seperti akad perjanjian dan data terkait.
- c. Studi kepustakaan, dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, data yang berupa bahan-bahan pustaka terkait *Legal Risk*.

5. Teknik Analisa Data

Dari data yang telah terkumpul selanjutnya penulis mencoba menganalisa secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.¹⁷

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. Hal. 29-31

¹⁷ Mardalis, 1999. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta. Bumi Aksara. Hal. 26

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab dan masing-masing bab akan menguraikan permasalahan secara berurutan. Adapun garis besar sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang teori-teori hukum sebagai bahan analisis dari permasalahan yang dibahas oleh penulis tentang *Legal Risk* dalam transaksi pembiayaan BPRS Bumi Rinjani Kota Batu.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan dan penjabaran atau penyajian data-data dari penelitian dan permasalahan yang ada dalam penulisan penelitian hukum ini, melalui pengkajian dengan menggunakan teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini dan dikaitkan dengan data yang diperoleh dari lapangan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya dan berisi saran dari penulis dengan harapan dapat menjadi bahan evaluasi dan manfaat bagi semua pihak.